

## **BAB V**

### **KESIMPULAN, IMPLIKASI, DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi pada 16 kabupaten/kota di Jawa Timur periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014 menggunakan analisis data panel, maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan yaitu:

1. Hipotesis dalam penelitian ini menyatakan bahwa desentralisasi fiskal dari indikator pengeluaran yang diukur melalui rasio pengeluaran kab/kota terhadap total pengeluaran seluruh kab/kot ditambah provinsi berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Jawa Timur. Namun setelah dilakukan perhitungan statistik ternyata indikator dari sisi pengeluaran berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 16 kab/kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian periode 2010-2014. Hal ini berarti apabila rasio pengeluaran daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan. Penyebab desentralisasi fiskal dalam beberapa hal menjadi kurang menguntungkan bagi pertumbuhan antara lain karena komposisi pengeluaran pemerintah yang kurang tepat hal ini dapat dilihat dari besarnya jumlah belanja tidak langsung daripada belanja langsung seperti belanja modal pada 16 kab/kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian.
2. Hipotesis yang menyatakan desentralisasi fiskal pada indikator pendapatan yang diukur melalui rasio PAD terhadap TPD berpengaruh positif terhadap

pertumbuhan ekonomi dapat diterima dan signifikan secara statistik. Hal ini berarti kenaikan rasio PAD terhadap TPD dapat menaikkan pertumbuhan ekonomi pada 16 kabupaten/kota di Jawa Timur yang menjadi objek penelitian periode 2010 sampai 2014.

## **B. Implikasi**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan pada penelitian ini, implikasinya adalah sebagai berikut:

1. Pengaruh negatif dari desentralisasi fiskal pada sisi pengeluaran akan menurunkan pertumbuhan ekonomi. Peran desentralisasi fiskal dalam sisi pengeluaran ini masih memberikan keragu-raguan dalam meningkatkan pembangunan di daerah karena inefisiensi belanja daerah yang tidak tepat sasaran dan lebih cenderung untuk pengeluaran belanja pegawai bukan pada belanja modal yang menjadi modal investasi. Pemerintah daerah yang seharusnya menjadi bagian yang paling tahu preferensi kebutuhan daerahnya masing-masing belum menjalankan tugasnya sebagaimana mestinya.
2. Pengaruh positif dari indikator penerimaan yang diukur melalui rasio PAD terhadap TPD pada pertumbuhan ekonomi mengindikasikan juga kemandirian daerah yang meningkat akan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Pemberian kewenangan kepada daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan daerah sendiri melalui pajak dan retribusi harus tetap

dimaksimalkan agar ketergantungan daerah dari dana transfer maupun dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) dapat dikurangi.

### **C. Saran**

Setelah mendapatkan hasilnya, adapun saran-saran yang dapat peneliti berikan adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah daerah hendaknya dapat menciptakan efisiensi anggaran untuk itu pemerintah daerah harus lebih paham dengan preferensi kebutuhan masyarakatnya. Alokasi anggaran hendaknya lebih banyak digunakan pada pembangunan infrastruktur seperti pembangunan jalan penghubung atau transportasi, pembangkit energi, dan telekomunikasi.
2. Kewenangan pemerintah daerah untuk menggali sumber pendapatannya sendiri harus terus dimanfaatkan serta ditingkatkan, karena hal tersebut mewujudkan kemandirian daerah yang tidak bergantung pada dana perimbangan dari pusat agar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah.
3. Pemerintah pusat hendaknya dapat mengevaluasi pegawai daerah guna meningkatkan kompetensi pegawai daerah dalam mengatur serta mengelola keuangan publik serta memonitoring agar mencegah terjadinya Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN) yang dapat membuat inefisiensi anggaran pemerintahan daerah.